

1. Perkembangan inflasi daerah dan atau perkembangan harga barang kebutuhan pokok dan penting, barang lainnya dan jasa serta risiko ke depan.

Pada Triwulan IV tahun 2025, Tim Pengendalian Inflasi Daerah Provinsi Gorontalo mencatat inflasi sebesar 2,52% (YoY) dan berada di titik tengah rentang sasaran Nasional  $2,5 \pm 1\%$  YoY. Capaian ini tidak lepas dari kontribusi seluruh anggota TPID provinsi, kabupaten dan kota serta instansi vertikal terkait, seperti Bank Indonesia, Perum Bulog, dan BPS yang senantiasa mendukung program pengendalian inflasi di Provinsi Gorontalo.

Berdasarkan data BPS Provinsi Gorontalo, pada bulan Oktober 2025 Provinsi Gorontalo mengalami deflasi sebesar 0,14% (mtm), bulan November 2025 mengalami inflasi sebesar 0,24% (mtm), dan bulan Desember 2025 juga mengalami inflasi sebesar 0,88% (mtm).

Data perkembangan harga pada Dinas Kumperindag Provinsi Gorontalo menunjukkan pada triwulan IV 2025, harga cabai rawit cukup fluktuatif. Pada minggu pertama bulan Oktober 2025 harga cabai rawit sebesar Rp 60.000 per kg, kemudian mengalami penurunan harga direntang Rp 45.000 – Rp 40.000 per kg. Namun pada minggu kedua bulan Desember 2025 harga cabai rawit kembali naik menjadi Rp 70.000 per kg dan pada akhir Desember 2025 harganya Rp 60.000 per kg.

Komoditas bawang merah yang didatangkan dari Enrekang, Sulawesi Selatan dan Bima, NTB, pada triwulan IV harganya terus merangkak naik. Pada bulan Oktober dan November 2025 harganya berkisar Rp 40.000 – Rp 50.000 per kg. Kemudian bulan Desember 2025 harganya naik Rp 60.000 – Rp 70.000 per kg.

Pada triwulan IV 2025 harga beras cenderung stabil, pada bulan Oktober 2025 harga beras sebesar Rp 16.875 per kg, kemudian mulai bulan November – Desember 2025 harganya Rp 16.250 per kg.

Komoditas tomat pada triwulan IV 2025 harganya juga stabil yaitu Rp 10.000 per kg, hanya pada bulan November 2025 naik menjadi Rp 12.000 per kg.

Risiko ke depan, tekanan inflasi di Provinsi Gorontalo diperkirakan tetap terkendali seiring dengan prospek penurunan harga beras, yang didukung oleh rencana optimalisasi penyaluran beras SPHP hingga 31 Januari 2026 guna menjaga ketersediaan pasokan dan stabilitas harga di Tingkat konsumen melalui berbagai kanal penyaluran.

Risiko inflasi masih perlu diantisipasi, terutama dari kelompok pangan bergejolak. Cabai rawit diperkirakan mengalami tekanan harga akibat menurunnya persediaan lokal, berkurangnya pasokan dari Sulawesi Tengah, serta meningkatnya permintaan. Selain itu, menjelang HBKN Ramadhan dan Idul Fitri, peningkatan permintaan pangan di Provinsi Sulawesi Utara berpotensi menekan pasokan tomat dari Gorontalo, sehingga meningkatkan kerentanan pasokan pangan strategis dan risiko terhadap stabilitas harga daerah.

2. Identifikasi permasalahan pengendalian inflasi di daerah.

Pengendalian inflasi di Provinsi Gorontalo Triwulan IV 2025 masih didominasi dari kelompok *volatile food* dan ikan segar. Komoditas cabai rawit mengalami fluktuasi harga, pada bulan

Oktober dan November 2025 cabai rawit menyumbang deflasi. Penurunan harga cabai rawit seiring dengan peningkatan pasokan dari Kab. Parigi Moutong dan dalam daerah pasca panen. Namun pada bulan Desember 2025 terjadi peningkatan harga cabai rawit yang disebabkan peningkatan permintaan dari daerah sekitar Gorontalo seiring dengan periode HBKN Nataru.

Selain itu komoditas beras juga menyumbang deflasi, hal tersebut disebabkan oleh peningkatan persediaan pasca periode panen gadu dan optimalnya penyaluran beras SPHP oleh Bulog Cabang Gorontalo melalui berbagai kanal distribusi, antara lain Gerakan Pangan Murah (GPM), TNI/POLRI, hingga penyaluran beras SPHP di tingkat kecamatan/desa bekerjasama dengan OPD terkait.

Komoditas bawang merah mengalami peningkatan harga, hal tersebut dipengaruhi oleh peningkatan permintaan pada periode HBKN Nataru dan menurunnya pasokan bawang merah dari daerah penghasil (Enrekang, Sulawesi Selatan). Sedangkan tomat menyumbang deflasi, hal tersebut dipengaruhi oleh tingginya persediaan selama periode HBKN Nataru.

### 3. Pelaksanaan kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

Berbagai strategi pengendalian inflasi terus dilakukan dan menekankan pentingnya sinergi antar instansi untuk mendorong realisasi inflasi agar tetap berada dalam sasaran target inflasi nasional. Program-program dirumuskan dengan tetap mengacu pada *roadmap* pengendalian inflasi dengan mengedepankan prinsip 4K (Ketersediaan Pasokan, Keterjangkauan Harga, Kelancaran Distribusi, dan Komunikasi yang Efektif). TPID Provinsi Gorontalo pada Triwulan IV tahun 2025 telah melakukan sejumlah upaya pengendalian inflasi pangan sebagai berikut:

#### **Keterjangkauan Harga**

1. Terus mendorong realisasi penyaluran beras SPHP oleh Bulog di Tingkat kecamatan dan kelurahan/desa serta gerai ritel modern skala kecil dan besar
2. Penyaluran program bantuan pangan Oktober-November 2025
3. Pelaksanaan Pasar Murah
4. Pelaksanaan Gerakan Pangan Murah
5. Penyerahan bantuan pangan Pemerintah Provinsi Gorontalo kepada 255 KPM di Kabupaten Gorontalo

#### **Ketersediaan Pasokan**

1. Perencanaan KAD antara Gorontalo-Sulut terkait komoditas tomat dan akan diperluas dengan KAD antara Bone Bolango-Kota Tomohon dan Minahasa Selatan untuk komoditas tomat dan hortikultura
2. Penyaluran bantuan PI-KEKDA *greenhouse* di Ponpes Hubulo, Mathlul Huda, Al-Barokah, dan Darul Madinah
3. Pembagian *polybag* komoditas cabai rawit dari Pemerintah Provinsi Gorontalo kepada Kab. Boalemo sebanyak 6.750 *polybag*, Kab. Pohuwato sebanyak 6.750 *polybag*, Kab. Gorontalo sebanyak 6.750 *polybag*, dan Kab. Bone Bolango sebanyak 4.050
4. Penyaluran bantuan taksi nelayan berupa 5 kapal 5GT kepada 5 koperasi nelayan untuk meningkatkan produktivitas ikan segar
5. Peninjauan stok pasokan beras, minyak dan komoditas penting ke Gudang Bulog
6. Penyaluran dukungan PI-KEKDA kepada 3 kelompok untuk budidaya sisi hulu (komoditas beras, cabai rawit, dan jagung)

Bantuan benih jagung sebanyak 105 ton yang diserahkan kepada 5.853 petani di Kab.

7.

Gorontalo dan Boalemo untuk mendukung luas tanam 7.000 ha ditambah 90 ton untuk 4.486 petani di 11 kecamatan dan 77 desa Kab. Gorontalo Utara dengan luas tanam 6.000 ha

### **Kelancaran Distribusi**

1. Penandatanganan kerja sama antar daerah Provinsi Gorontalo dan Provinsi Kalimantan Timur dengan memanfaatkan skema tol laut pemerintah.
2. Kerja sama antar daerah Kab. Bone Bolango dan Kab. Minahasa Selatan untuk komoditas hortikultura. KAD tersebut turut dibarengi dengan penandatanganan Kerjasama secara B2B antara pedagang di Bone Bolango dan pedagang/petani dari Minahasa Selatan
3. Fasilitasi Distribusi Pangan (FDP) GPM dalam rangka HUT Provinsi Gorontalo
4. FDP dalam rangka kegiatan GPM di Kabupaten Pohuwato

### **Komunikasi Efektif**

1. Publikasi kegiatan penyaluran beras SPHP untuk memberi sinyal kepada Masyarakat bahwa harga beras masih terjangkau
  2. Pembahasan roadmap TPID bersama Kemendagri dengan Biro Ekonomi se Indonesia
  3. Capacity Building TPID se Provinsi Gorontalo terkait penguatan BUMD dan Manajemen ternak di Samarinda
  4. Pelaksanaan rapat mingguan pengendalian inflasi yang dilakukan bersama dengan rapat koordinasi pengendalian inflasi mingguan Kemendagri
  5. Capacity Building TPID dengan tema peningkatan kualitas neraca pangan digital bersama Bapanas
  6. Press release di media social dan media local terhadap kinerja inflasi dan capaian inflasi periode Oktober
  7. Pelaksanaan HLM TPID Provinsi Gorontalo, Kabupaten Bone Bolango, dan Kabupaten Gorontalo Utara
  8. Himbauan belanja bijak dalam rangka HBKN Nataru.
4. Evaluasi kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

Evaluasi kebijakan pengendalian inflasi di Provinsi Gorontalo Triwulan IV-2025 adalah inflasi pangan diperkirakan tetap terkendali seiring dengan prospek penurunan harga beras, yang didukung oleh rencana optimalisasi penyaluran SPHP hingga 31 Januari 2026 guna menjaga ketersediaan dan stabilitas harga di tingkat konsumen melalui berbagai kanal penyaluran.

Tekanan inflasi bulanan dari kelompok pangan bergejolak masih perlu diwaspadai, terutama pada komoditas cabai rawit yang mengalami kenaikan harga akibat menurunnya persediaan local, berkurangnya pasokan dari daerah penghasil seperti Sulawesi Tengah serta meningkatnya permintaan di pasaran. Selain itu, menjelang HBKN Ramadhan dan Idul Fitri, peningkatan permintaan komoditas pangan di daerah sekitar Gorontalo berpotensi menekan pasokan tomat dari Gorontalo, sehingga menambah risiko tekanan harga.

Dalam pelaksanaan kegiatan pengendalian inflasi terdapat beberapa ruang untuk pengembangan ke depan seperti meningkatkan pemanfaatan Pusat Informasi Harga Pangan Strategis (PIHPS) yang lebih optimal, *Early Warning System* (EWS) Inflasi, *pelaksanaan High*

*Level Meeting* TPID menjelang HBKN Nataru, penyediaan pangan dengan harga terjangkau melalui pasar murah bersubsidi, Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) bersama Bulog, Perencanaan program Kerja sama Antar Daerah (KAD) yaitu KAD *Government to Government* (G2G) antara Pemerintah Provinsi Gorontalo dengan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan untuk komoditas bawang merah.

## 5. Rekomendasi kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

Rekomendasi kebijakan pengendalian inflasi di Provinsi Gorontalo pada Triwulan IV 2025, dalam rangka menjaga pasokan, keterjangkauan harga serta mengendalikan inflasi daerah, diharapkan kepada Pemerintah Provinsi, Kota dan Kabupaten melakukan hal-hal sebagai berikut:

### **Keterjangkauan Harga**

1. Menjelang HBKN Natal dan Tahun Baru 2026, diharapkan kepada Bupati/Walikota dan seluruh pihak untuk terus secara masif melaksanakan pasar murah dan Gerakan Pangan Murah di masing-masing wilayahnya dengan komoditas penyumbang inflasi.

### **Ketersediaan Pasokan**

1. Memastikan ketersediaan pasokan beras, bawang merah, cabai rawit, dan daging ayam RAS khususnya menjelang HBKN Natal dan Tahun Baru 2026.
2. Memastikan ketersediaan pasokan beras, bawang merah, bawang putih, daging ayam, minyak goreng dan cabai rawit seiring dengan meningkatnya permintaan pada perayaan HBKN Natal dan Tahun Baru 2026

### **Kelancaran Distribusi**

1. Menindaklanjuti dengan segera Kerjasama Antar Daerah (KAD) untuk mendukung distribusi bahan pokok dari luar daerah ke dalam provinsi.

### **Komunikasi Efektif**

1. Mendorong TPID Provinsi dan Kab/Kota untuk terus memantau pergerakan harga serta persediaan Beras, Cabai Rawit, Bawang Merah, dan minyak goreng di level distributor dan konsumen serta pengawasan tata niaga sesuai dengan aturan yang ditetapkan pemerintah.
2. Diharapkan Pemerintah Kabupaten/Kota secara aktif melakukan pemantauan ketersediaan dan harga sembako khususnya untuk komoditas penyumbang inflasi.